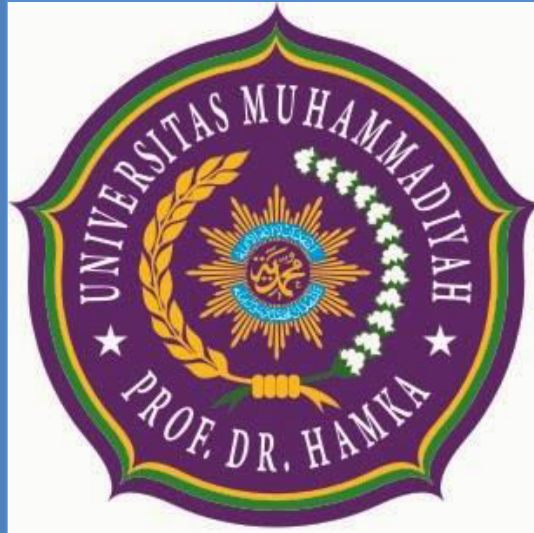


**PROPOSAL PENELITIAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**



**KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN
SUKARELA**

NOMOR KONTRAK PENELITIAN: 197/F.03.07/2017

OLEH:

ZULPAHMI, SE., M.Si (0308097403)

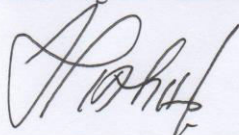
SUMARDI, SE., M.Si (0318018401)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
TAHUN 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

Judul Penelitian	KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN SUKARELA
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	Zulpahmi., SE., M.Si
b. NPD/NIDN	D.07.0670/0308097403
c. Jabatan Fungsional	Lektor
d. Fakultas/Program Studi	Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
e. H.P/Telpon	08567952427
f. Alamat Surel	zulpahmip@yahoo.com
Anggota Peneliti 1	
a. Nama lengkap	Sumardi., SE., M.Si
b. NPD/NIDN	D.14.0850/0318018401
c. Fakultas/Program Studi	Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Anggota Peneliti 2	
a. Nama lengkap	
b. NPD/NIDN	
c. Fakultas/Program Studi	
Lama Penelitian	6 bulan
Luaran Penelitian	1. Laporan Penelitian 2. Artikel Ilmiah Jurnal Terakreditasi
Biaya Penelitian Diusulkan	Rp. 8.965.000,-

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Daram Heriansyah., SE., M.Si
NIDN. 0325037902

Dekan FEB-UHAMKA



Nuryadi., SE., MM
NIDN. 0327056501

Jakarta, 7 Juli 2017

Ketua Peneliti



Zulpahmi., SE., M.Si
NIDN. 0318018401

Menyetujui,

Ka. LEMLITBANG



Prof. Dr. Suswandari., M.Pd
NIDN. 0020116601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 197 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; -- Zulpahmi SE., M.Si., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN SUKARELA**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 31 Juli 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.965.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.365.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

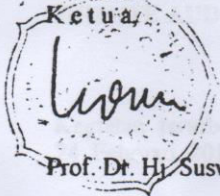
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8418034, 87781803; Fax. 87781809

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

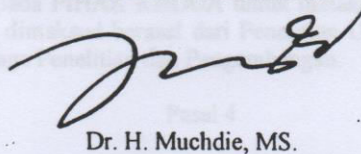
PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Ketua

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,


-- Zulpahmi SE., M.Si.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA


Dr. H. Muchdie, MS.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERJANJIAN KONTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Luaran Kegiatan	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keagenan	5
2.2 Komite Audit	5
2.3 Voluntary Financial Disclosure	7
2.4 Komite Audit dan <i>Disclosure</i>	8
2.5 Kerangka Penelitian	9
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	10
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	10
3.3 Ruang lingkup dan Batasan Penelitian	12
3.4 Teknik Analisis Data	13
BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif	15
4.2 Uji Asumsi Klasik	17
4.3 Analisis Regresi Berganda	18
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan	19
BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN	
5.1 Kesimpulan Penelitian	22
5.2 Keterbatasan dan Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan keuangan sukarela (pengungkapan keuangan sukarela) pada perusahaan di Indonesia. Karakteristik Komite Audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran, latar belakang keahlian komite audit, independensi, komitmen, pertemuan dan *tenure*. Adapun pengungkapan keuangan sukarela diukur dengan indeks yang di rujuk dari penelitian terdahulu mengenai tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan. Adapun permasalahan yang mendasari penelitian ini terdiri dari dua sisi, yaitu permasalahan praktis dan permasalahan empiris. Secara praktis, permasalahan mengenai pengungkapan keuangan terkait erat dengan manfaat transparansi informasi keuangan bagi kepentingan publik. Ketidakberhasilan perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan keuangan mengakibatkan rendahnya kepercayaan investor dan berakibat pada rendahnya aliran investasi pada perusahaan. Permasalahan kedua, yaitu permasalahan empiris. Sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana disajikan pada bab pendahuluan memperlihatkan masih dibutuhkannya penelitian tambahan untuk memperkuat generalisasi hasil penelitian mengenai keterkaitan komite audit dan pengungkapan keuangan sukarela.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan tergolong dalam penelitian *hypothesis testing*. Penelitian pengujian hipotesis merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Kata kunci: ukuran, latar belakang keahlian, *tenure* komite audit, pengungkapan keuangan sukarela

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan keuangan sukarela (pengungkapan keuangan sukarela) pada perusahaan di Indonesia. Karakteristik Komite Audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran, latar belakang keahlian, dan *tenure*. Adapun pengungkapan keuangan sukarela diukur dengan indeks yang di rujuk dari penelitian terdahulu mengenai tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan keuangan oleh perusahaan menjadi dasar bagi investor mengambil keputusan investasi. Tingkat pengungkapan yang rendah memperlihatkan rendahnya transparansi pelaporan data keuangan perusahaan. Fenomena perusahaan Enron di Amerika Serikat telah mengakibatkan kerugian luar biasa bagi investor, kreditor, menyebabkan 4500 karyawan kehilangan pekerjaannya, dan meruntuhkan kantor Akuntan Publik ternama di dunia Arthur Anderson (Thomas, 2002). Kondisi ini memperlihatkan luasnya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari rendahnya transparansi keuangan perusahaan dan fraud yang terstruktur.

Di Indonesia, kasus serupa juga terjadi, salah satunya pada PT. Kimia Farma, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Kimia Farma terbukti telah mempublikasikan laba yang *overstated*. Penggelembungan laba ini juga berdampak merugikan, karena informasi keuangan yang telah dipublikasikan tersebut telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor (Tjager *et al.*, 2003). Kasus Kimia Farma di Indonesia kembali menggaris bawahi pentingnya prinsip transparansi, khususnya pengungkapan keuangan.

Pada dasarnya, menurut Scott (2012) jenis pengungkapan yang dipublikasikan perusahaan terbagi dua yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). Semakin luas cakupan pengungkapan oleh perusahaan, maka semakin baik pula pemahaman pasar atas perusahaan, sehingga menurunkan ketidakpastian akibat asimetri informasi. Sebagai akibatnya, investor tidak

dapat membedakan kualitas perusahaan dan tidak dapat memperkirakan risiko investasi dengan tepat.

Penelitian terdahulu telah mengaitkan pengungkapan dengan sejumlah faktor. Salah satu penelitian mengaitkan pengungkapan dengan karakteristik komite audit. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan antara lain, *human capital* (pendidikan dan pengalaman) yang dimiliki individu dalam komite audit (Reeb dan Zhao, 2009), keahlian dan independensi Komite Audit (Felo dan Solieri, 2009), serta keahlian akuntansi/keuangan dalam analisa pelaporan keuangan (McDaniel *et al.* 2002). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa karakteristik Komite Audit merupakan faktor yang berpengaruh pada pengungkapan keuangan perusahaan. Peran Komite audit dalam peningkatan transparansi didasarkan pada alasan pembentukan Komite Audit itu sendiri. Komite Audit dibentuk oleh komisaris sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris melaksanakan fungsi verifikasi/pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Setiany, Hartoko, Suhardjanto, dan Honggowati, 2017).

Di Indonesia penelitian mengenai keterkaitan Komite Audit dan Pengungkapan juga telah banyak diteliti. Arifin (2001) menggunakan tingkat kehadiran anggota komite audit sebagai proksi dari komite audit, penelitian oleh Mujiono (2004) yang menggunakan proksi persentase komisaris independen dalam komite audit, sedangkan penelitian Linda *et al.* (2011) yang mengaitkan ukuran komite audit. Dari ketiga penelitian di Indonesia tersebut (Arifin *et al.*, 2001; Mujiono, 2004; Linda dan Nuraini, 2011, dan Setiany, Hartoko, Suhardjanto, dan Honggowati, 2017). Hasil penelitian yang inkonsisten pada sejumlah penelitian terdahulu mempertegas pentingnya dilakukan pengujian kembali terhadap keterkaitan karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian ini dengan menggunakan enam proksi sekaligus untuk menguji peran komite audit terhadap pengungkapan keuangan sukarela, termasuk mengidentifikasi proksi baru yang mewakili komite audit, yaitu *tenure*. *Tenure* digunakan dalam penelitian ini dengan alasan anggota komite audit dianggap lebih mampu memberikan pengawasan secara kritis apabila lebih memahami karakteristik perusahaan (Jia *et al.* 2009).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
2. Apakah terdapat pengaruh latar belakang keahlian komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3. Apakah terdapat pengaruh tenure komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bab terdahulu mengenai permasalahan penelitian, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, fenomena yang terjadi laangan dan teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat disampaikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
2. Menguji pengaruh latar belakang keahlian komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3. Menguji pengaruh tenure komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara konseptual dalam pengembangan literatur mengenai peran komite audit terhadap praktek pengungkapan keuangan sukarela oleh perusahaan *go public* di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi regulator dan perusahaan, untuk merumuskan kualifikasi individu yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan anggota komite audit agar tujuan untuk

memastikan transparansi informasi yang disampaikan manajemen pada publik dapat tercapai.

1.5 Luaran yang diharapkan

Seperti halnya penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini memiliki luaran yang diharapkan, yaitu: Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Publikasi dalam seminar nasional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang ditetapkan antara prinsipal dan agen untuk menjalankan kegiatan usaha dan bekerja untuk kepentingan prinsipal, termasuk di dalamnya pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal pada agen. Keberadaan kontrak antara prinsipal dan agen yang disertai pendelegasian wewenang ini, memunculkan kemungkinan agen mengambil keputusan-keputusan bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri (*opportunistic behavior*).

Investor membutuhkan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan investasi. Hubungan antara manajemen dan investor yang pada dasarnya saling membutuhkan, akan terkendala oleh *information problem* dan *agency problem*. Ini mengakibatkan peranan laporan keuangan menjadi penting karena perbedaan kualitas informasi antara manajemen dan investor dapat menyebabkan ketidakmampuan investor menentukan pilihan investasi yang baik (Healy dan Palepu, 2001).

Untuk mengatasi masalah keagenan inilah kemudian dibentuk komite audit. Komite audit dibentuk oleh komisaris, untuk menjalankan fungsi verifikasi/pengawasan terhadap manajemen.

2.2 Komite Audit

Komite audit menurut Tjager *etal.* (2003) adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Pendapat Tjager *et al.* (2003) tersebut menunjukkan peran sentral yang dijalankan komite audit, dan karenanya individu-individu yang dipilih menjadi anggota komite audit perlu memenuhi sejumlah kriteria.

Pembentukan komite audit dalam kerangka *corporate governance* bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang disusun dan diungkap manajemen perusahaan menjadi informasi public. Pada tahun 2000 Bapepam menerbitkan SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 tentang pembentukan komite audit, disusul dengan penerbitan surat Keputusan Direksi BEI No. 339 tahun 2001 oleh Ketua BEI mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris Independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Kemudian tahun 2003 Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-411PM/2003 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang selanjutnya direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-24/PM/2004 dan lampiran no. IX.I.5 pada tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Kedua peraturan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pembentukan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia.

Berge dan Ridder (1999) merumuskan empat tugas yang harus diemban oleh komite audit, antara lain (1) Mengawasi laporan keuangan dan pelaporan keuangan, (2) Mengawasi system pelaporan dan system informasi manajemen, (3) Menguji system pengendalian keuangan (pengendalian intern dan ekstern) dan manajemen resiko, (4) mengawasi independensi pengendalian eksternal dan internal, serta memilih auditor publik. Berdasarkan rumusan tugas dari Berge dan Ridder (1999) ini terlihat peran sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan pelaporan perusahaan, dengan demikian transparansi informasi yang diungkap manajemen sangat ditentukan oleh keberhasilan komite audit menjalankan tugasnya.

Kalbers dan Fogarty (1993) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu 1) kewenangan formal dan tertulis, 2) kerjasama manajemen dan 3) kualitas/kompetensi anggota komite audit (Abbott *et al.*, 2004). Mengacu pada pendapat Kalbers dan Fogarty (1993) tersebut nampak bahwa kualifikasi individu yang ditetapkan sebagai anggota komite audit sangat berperan dalam keberhasilan komite audit menjalankan tugas pengawasan pada informasi yang diungkap manajemen. Oleh sebab itu maka,

sebagaimana dinyatakan oleh Abbott *et al.* (2000), maka perlu dirumuskan ukuran-ukuran tertentu mengenai efektifitas komite audit yang dapat menjalankan tugasnya.

2.3 Voluntary Financial Disclosure

Menurut Scott (2006), pada dasarnya jenis informasi yang diungkapkan perusahaan terbagi dua yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah jenis penyampaian informasi keuangan perusahaan pada publik yang diungkapkan secara sukarela di dalam laporan keuangan, tanpa ada kewajiban yang mengaturnya.

Bruslerie dan Gabteni (2011) menyatakan pengungkapan keuangan sukarela merupakan tambahan informasi keuangan yang diungkap perusahaan melebihi kewajiban pengungkapan yang dimandatkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan, pengungkapan keuangan sukarela merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan secara sukarela oleh perusahaan dan bersifat memperluas pengungkapan informasi keuangan wajib.

Arti penting pengungkapan sukarela menurut Tian dan Chen (2009) adalah sebagai sarana yang efektif dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan karena mampu memberikan gambaran tentang prospek perusahaan, menyempurnakan struktur *governance* dan memperluas perlindungan terhadap investor. Senada dengan pendapat Tian dan Chen tersebut, Botosan (1997) menyatakan bahwa *voluntary disclosure* berperan mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara perusahaan dengan investor dan pihak lain di luar perusahaan. Pendapat Botosan (1997) serta Tian dan Chen (2009) tersebut menunjukkan peran penting *voluntary disclosure*, sehingga menjadikan kajian mendalam mengenai praktek dan pengungkapan keuangan sukarela ini penting.

Penelitian Meek *et al.* (1995) secara spesifik menjelaskan teknik yang digunakannya dalam menentukan item pengungkapan sukarela. Meek *et al.* (1995) mengawali dengan mengidentifikasi 128 item *voluntary disclosure* yang potensial dari berbagai laporan tahunan perusahaan serta mengidentifikasi seluruh peraturan yang wajib dilaporkan/*mandatory disclosure*, meliputi peraturan SEC, standar publik, standar privat, booklet AICPA, peraturan bursa negara lain (tempat perusahaan sampel pada awalnya terdaftar),

sehingga dapat menghasilkan item pengungkapan yang komprehensif. Seluruh item potensial *voluntary disclosure* yang telah diidentifikasi tersebut kemudian ditandingkan dengan item pengungkapan yang bersifat *mandatory* dan diidentifikasi kembali. Namun demikian identifikasi item pengungkapan yang dilakukan oleh Meek *et al.* (1995) ini tidak mempertimbangkan kebutuhan investor dan analisis pasar. Oleh sebab itu penelitian ini menggabungkan item pengungkapan yang disusun Meek *et al.* (1995) dengan item pengungkapan yang disusun oleh Botosan (1997).

Dalam penelitian Botosan (1997) item pengungkapan dibagi menjadi lima golongan yang diidentifikasi berdasarkan kebutuhan informasi oleh investor dan analisis dalam rangka mengambil keputusan investasinya. Botosan (1997) kemudian membagi *voluntary disclosure* menjadi lima kelompok yaitu, *background information, ten-or-five year summary or historical result, key non financial statistics, projected information, management discussion and analysis.*

2.4 Komite Audit dan Disclosure

Penelitian ini menfokuskan pada sisi *financial* dari *voluntary disclosure* karena peran komite audit yang didasarkan pada SK Bapepam no. IX.I.5 nomor 3 huruf c nomor 1) yang menyatakan bahwa tugas komite audit adalah melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Dengan demikian diharapkan, pemilihan sisi keuangan dari *voluntary disclosure* dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan tidak bias mengenai peran komite audit.

Vicknair (1993) menyatakan bahwa komposisi komite audit dapat berpengaruh pada proses pelaporan keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh positif signifikan ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan (Beasley, 1996; Felo *et al.*, 2003; Felo *et al.*, 2009; Lindadan Nuraini, 2011) namun demikian hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Hoitash *et al.* (2009). Pertentangan hasil penelitian ini mendorong peneliti untuk menggunakan ukuran sebagai salah satu *proksi* komite audit dan menguji pengaruhnya terhadap *voluntary financial disclosure*. Ukuran komite audit diharapkan menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan

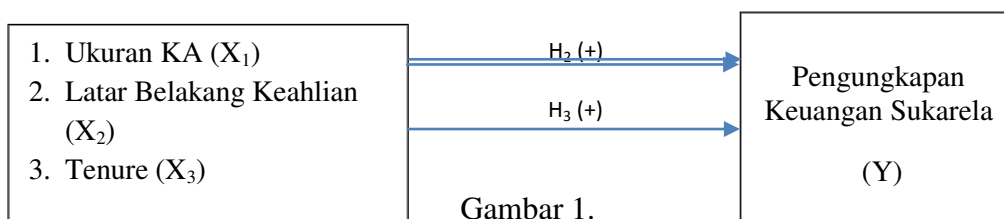
keuangan sukarela karena ukuran komite audit didesain oleh dewan komisaris untuk memastikan efektifitas pengawasan (Kalbers dan Fogarty, 1993).

Menurut Felo (2003) penting bagi komite audit untuk mengenali adanya potensi penyesatan (*misleading*) pada pencatatan transaksi atau laporan keuangan, dan berkontribusi pada pelaporan akuntansi yang berkualitas. Ini berarti anggota komite audit harus memiliki kemampuan untuk mengenali potensi *misleading* tersebut, dan kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh individu yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Oleh karena itu, Bapepam (2004) mengatur bahwa sekurangnya satu orang anggota komite audit harus memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan, dan anggota lainnya harus dapat membaca dan memahami laporan keuangan.

Penelitian lain yang menunjukkan pengaruh positif signifikan keahlian anggota komite audit terhadap *disclosure* ditunjukkan oleh Abbott (2000), Agrawal dan Chadha (2005), Krishnan dan Visvanathan (2007), Krishnan dan Lee (2009), Felo *et al.* (2009), Reeb dan Zhao (2009). Berbagai pendapat tersebut, menggaris bawahi kebutuhan komite audit terhadap individu dengan kualifikasi keahlian akuntansi dan keuangan, agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Karenanya dalam penelitian ini latar belakang keahlian akuntansi/keuangan digunakan sebagai salah satu proksi komite audit untuk diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan keuangan sukarela perusahaan di Indonesia.

2.5 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, dirumuskan kerangka penelitian yang dikembangkan menjadi hipotesis penelitian. Komite audit diteliti melalui tiga *proksi* yang terdiri dari; ukuran, keahlian, dan *tenure* anggota komite audit. Masing-masing *proksi* diuji pengaruhnya terhadap *voluntary financial disclosure*.



BAB II

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan tergolong dalam penelitian *hypothesis testing* (Sekaran dan Bougie, 2015). Adapun permasalahan yang mendasari penelitian ini terdiri dari dua sisi, yaitu permasalahan praktis dan permasalahan empiris. Secara praktis, permasalahan mengenai pengungkapan keuangan terkait erat dengan manfaat transparansi informasi keuangan bagi kepentingan publik. Ketidak berhasilan perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan keuangan mengakibatkan rendahnya kepercayaan investor dan berakibat pada rendahnya aliran investasi pada perusahaan. Permasalahan kedua, yaitu permasalahan empiris. Sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana disajikan pada bab pendahuluan memperlihatkan masih dibutuhkannya penelitian tambahan untuk memperkuat generalisasi hasil penelitian mengenai keterkaitan komite audit dan pengungkapan keuangan sukarela. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kedua sisi permasalahan tersebut di atas.

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini mermuskan oaperasionalisasi variable dan pengukurannya sebagai berikut:

1. Variable dependen : Pengungkapan keuangan sukarela (DISC)

Variabel Pengungkapan sukarela menurut Setiany (2016) adalah Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan tersebut berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat wajib. Lebih lanjut menurut Scott (2012), pengungkapan sukarela adalah jenis penyampaian informasi keuangan perusahaan pada publik yang diungkapkan secara sukarela di dalam laporan keuangan, tanpa ada kewajiban yang mengaturnya.

Pengungkapan diukur dengan menggunakan skor tingkat pengungkapan sukarela berdasarkan ceklist yang disusun oleh Setiany (2016). Ceklist tersebut terdiri dari 35 item pengungkapan sukarela di bidang keuangan dalam sebuah indeks tanpa pembobotan. Sehingga setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1(satu) dan yang tidak

diungkapkan diberi nilai 0 (nol). Dengan demikian skor maksimal yang dapat diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarelanya adalah 35 (item pengungkapan penelitian terlampir).

$$DISC = \frac{\Sigma \text{ Item Voluntary Financial Disclosure}}{\Sigma \text{ Total keseluruhan item}}$$

2. Variable independen.

Proksi komite audit yang digunakan sebagai variable independen pada penelitian ini antara lain terdiri dari:

a. Ukuran Komite Audit (SIZE)

Variabel ukuran komite audit mengacu pada penelitian Felo *et al.* (2003, 2009) diukur dengan menjumlahkan anggota komite audit yang ada dalam perusahaan. Pengukuran yang dilakukan Felo *et al.* (2003, 2009) tersebut didukung pula dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian Beasley (1996) dan Lindadan Nuraini (2011). Bapepam (2004) dan BEI (2001) mengatur bahwa komite audit sekurangnya berjumlah 3 orang, jumlah anggota komite audit yang dibentuk oleh perusahaan dapat diperoleh informasinya dari laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan.

$$SIZE = \Sigma \text{ Anggota Komite audit}$$

b. Latar belakang keahlian Akuntansi/Keuangan (AHLI)

Penelitian Felo *et al.* (2003, 2009) mengukur keahlian akuntansi dan keuangan dalam anggota komite audit melalui latar belakang keahlian akuntansi/keuangan atau memiliki pengalaman kerja sebagai auditor, manajer keuangan atau menjabat sebagai *chief financial officer* (CFO). Pengukuran ini sejalan dengan aturan BAPEPAM dalam Keputusan Ketua No.: Kep-24/PM/2004 lampiran No. IX.I. nomer 3 huruf b angka 1) yang menyatakan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang keahliannya.

Oleh sebab itu, pendidikan akuntansi dan keuangan dalam penelitian ini, sebagaimana penelitian Felo *et al.* (2003, 2009), diukur dari proporsi anggota komite

yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan di bandingkan seluruh anggota komite audit.

$$\text{AHLI} = \frac{\Sigma \text{Anggota KAberpendidikanakuntansi/keuangan}}{\Sigma \text{Anggota Komite Audit}}$$

c. Tenure Anggota Komite Audit (TENURE)

Mengacu pada penelitian Chi dan Huang (2005) *tenure* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang menunjukkan lamanya anggota komite audit menjabat sebagai komite audit perusahaan, karena jumlah anggota komite lebih dari satu orang maka dalam penelitian ini *tenure* anggota komite audit diukur dengan reratanya.

Pengukuran serupa juga digunakan dalam penelitian Abbott *et al.* (2000), Krishnan (2005) dan Jia *et al.* (2009). Oleh sebab itu, maka variable *tenure* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TENURE} = \frac{\Sigma \text{Jumlah tahun menjabat anggota komite audit}}{\Sigma \text{Anggota Komite Audit}}$$

3.3 Ruang lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder diperoleh dari situs www.idx.co.id dan *website* masing-masing perusahaan sampel. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Adapun proses penentuan sampel didahului dengan menentukan sampel frame. Sampel frame merupakan suatu daftar yang lengkap dari anggota populasi (Sekaran dan Bougie, 2015). Dari sampel frame tersebut kemudian dipilih sampel yang diinginkan. Sampel frame penelitian ini berarti nama-nama perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan tahunan perusahaan dari perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan sample didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tergabung dalam index Kompas 100 selama tahun 2013-2015. Index Kompas 100 dipilih karena mewakili 70-80% kapitalisasi pasar di BEI. Penelitian ini tidak mensyaratkan konsistensi perusahaan tergabung dalam index Kompas 100 karena menghindari *survivorship bias*.
2. Menyajikan data tentang latar belakang anggota komite audit yang memuat latar belakang keahlian, dan *tenure* komite audit secara lengkap.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan penelitian ini. Model analisis pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji korelasi, dan uji regresi berganda. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. Uji korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Estimasi model analisis menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Lebih lanjut, berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif, digunakan untuk mencari nilai rerata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel yang diteliti. Hasil statistik deskriptif dianalisis secara kualitatif.

2. Uji Regresi

Model analisis yang digunakan yaitu model analisis regresi berganda. Hasil estimasi model regresi berganda diuji dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, heteroskedastik dan multikolinieritas) dan uji statistik (uji t dan uji F), dan untuk mengukur ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Adapun persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$DISC = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 AHLI + \beta_3 TENURE + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Penjelasan Variable	Pengukuran
Pengungkapan sukarela (DISC)	keuangan Persentase skor pengungkapan, dengan cara memberi skor 1 pada item pengungkapan keuangan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan dan 0 pada item yang tidak diungkap.
Ukuran Komite Audit (SIZE)	Total anggota komite audit
Latar Belakang Keahlian (AHLI)	Proporsi anggota komite audit yang ahli akuntansi/keuangan terhadap total anggota komite audit x 100%
Tenure (TENURE)	Rerata masa jabatan yang telah dilalui sebagai anggota KA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

1. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.
2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *pvalue* (*probability value*). Jika p -value (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p -value (signifikan) $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah :

- H₁: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan keuangan sukarela perusahaan.
- H₂: Latar belakang keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan keuangan sukarela perusahaan.
- H₃: *Tenure* anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat tingkat pengungkapan keuangan sukarela perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Pengembangan model dalam penelitian ini menggunakan data yang meliputi, indeks *voluntary financial Disclosure* (DISC), Ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian akuntansi/keuangan komite audit (AHLI), dan *tenure* anggota komite audit (TENR).

Berdasarkan pengujian empiris yang dilakukan diperoleh informasi statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum dan rerata (*mean*). Statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat *voluntary financial disclosure* (DISC) di Indonesia memiliki nilai rerata 45.21 % dari poin maksimal *voluntary financial disclosure* yang diteliti yaitu 35 poin. Ini berarti tingkat pengungkapan *voluntary financial disclosure* di Indonesia masih rendah karena rerata memperoleh skor kurang dari setengah poin maksimal penelitian. Dari 57 perusahaan yang menjadi sample penelitian, nampak bahwa pada tahun 2009 terdapat 10 perusahaan yang skor *voluntary financial disclosure*-nya berada di bawah rerata dan 47 perusahaan yang skor pengungkapannya lebih dari atau sama dengan rerata. Skor terendah tingkat *voluntary financial disclosure* 11 poin atau setara 33% dari total skor maksimal nampak dari PT.BKSL. Sementara skor tertinggi 25 poin atau setara 72% dari total skor maksimal diperoleh PT BBNI.

Karakteristik data yang nampak melalui hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa reratanya pengungkapan *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia masih rendah. Perusahaan hanya mengungkap rerata 45.21 % yang berarti kurang dari setengah indeks pengungkapan penelitian ini. Ini dapat terjadi karena kesadaran perusahaan untuk mengungkap informasi keuangan yang bersifat sukarela masih rendah. Disamping itu manfaat *voluntary financial disclosure* juga belum dipahami, sehingga pengungkapan informasi ini belum dirasakan sebagai kebutuhan.

Perusahaan di Indonesia diharapkan perlu meningkatkan level pengungkapan informasi keuangan sukarela yang dipublikasikannya. Peningkatan level pengungkapan

ini diperlukan karena merupakan wujud transparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan, Sehingga pada akhirnya pemegang saham dan calon investor akan memperoleh informasi yang cukup luas untuk mengambil keputusan investasi dengan tepat.

Adapun rerata ukuran komite audit (SIZE) sebesar 3.6 menunjukkan bahwa rerata perusahaan mengangkat anggota komite audit hanya sejumlah aturan Bapepam yaitu 3 orang, ini nampak dari 57 sample perusahaan di tahun 2010 ternyata hanya 23 perusahaan yang memiliki anggota komite audit lebih dari 3 orang, sedangkan 34 perusahaan lainnya memiliki komite audit yang berjumlah 3 orang. Sementara di tahun 2009 sebanyak 35 perusahaan memiliki komite audit berjumlah 3 orang, dan 22 perusahaan memiliki anggota komite audit lebih dari 3 orang. Meskipun telah sesuai dengan aturan Bapepam No. IX.I.5. mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, namun demikian data ini juga dapat mengindikasikan bahwa dalam menetapkan jumlah anggota komite audit perusahaan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat dalam surat keputusan ketua Bapepam tersebut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variable	Mean	Minimum	Maximum
Latar belakang keahlian Akt/keuangan (%)	0,7591	0,33	1,00
Ukuran Komite audit	3,6316	3,00	7,00
<i>Tenure</i> Komite Audit	7,4614	2,00	14,00
<i>Voluntary Financial Disclosure</i> (%)	0,4521	0,22	0,72

Pendidikan akuntansi/keuangan (AHLI) menunjukkan rerata sebesar 75.91%. Ini berarti 75,91 % anggota komite audit memiliki latar belakang keahlian maupun pengalaman dibidang akuntansi/keuangan yang memadai. Bahkan jumlah perusahaan yang 100% anggota komite auditnya berlatar belakang akuntansi/keuangan pada tahun 2003 mencapai 24 perusahaan, sedangkan ditahun 2015 terdapat 21 perusahaan.

Tingginya rerata anggota komite audit berlatar belakang akuntansi/keuangan ini menunjukkan upaya serius dewan komisaris untuk; 1) memilih dan menetapkan anggota

komite audit yang memiliki kualifikasi pendidikan yang bermanfaat dalam membantu dewan komisaris memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tugas pengawasan. 2) mengikis kesenjangan informasi dan meningkatkan transparansi antara manajemen dan pemegang saham, melalui peran anggota komite audit yang ahli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata *tenure* komite audit di perusahaan sample adalah 7.46 tahun, yang artinya rerata KA menjabat lebih dari 1 periode (dengan asumsi periode masa jabatan 5 tahun). *Tenure* terendah adalah 2 tahun yaitu pada PT CTRP di tahun 2013 dan PT TRAM di tahun 2015. *Tenure* terlama adalah 12 tahun di PT CPIN di tahun 2015. Tingginya rerata *tenure* ini menunjukkan tingginya kebutuhan atas pengalaman komite audit dalam menjalankan tugasnya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2006) analisis regresi berganda (*multiple regression*) pengujian validitas data dilakukan sebagai syarat analisa regresi berganda agar penaksiran parameter dan koefisien regresi valid, tidak bias dan konsisten, maka berdasarkan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan kolmogorov-smirnov, uji DW dan VIF pada tabel 2 diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid.

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

<u>Variable</u>	<u>VIF</u>	<u>Pengujian Asumsi</u>
SIZE	1.323	Multikolinearitas
EDU	1.062	Multikolinearitas
MEET	1.332	Multikolinearitas
<i>Run test sig.</i>	0.132 > 0.05(sig)	Autokorelasi
<i>One Sampke K-</i>		
<i>S_Asym. Sig.</i>	0.994 > 0.05(sig)	Normalitas

Berdasarkan tabel 2, uji normalitas data menggunakan *One Sample* Kolmogorov-Smirnov menurut Gujarati (2006) dilakukan dengan melihat hasil pengujian Kolmogorov-Sminorv. Kriteria pengujiannya, apabila $\rho\text{-value}=0.994 > 5\%$ berarti data

berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk uji autokorelasi menggunakan Run test menunjukkan tingkat $p\text{-value} = 0.132 > 5\%$ berarti data tersebut bebas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi adanya gejala *multikolinearitas* dalam model penelitian menurut Ghozali (2006) nilai *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai $VIF < 10,00$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa suatu model regresi yang bebas *multikolinearitas*.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan kolmogorov-smirnov, uji DW dan VIF diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid. Maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban rumusan pertanyaan, mengenai pengaruh komite audit terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode *backward*. Metode *backward* menurut Ghozali (2006) adalah suatu metode mengolah data dengan cara memasukan seluruh variabel independen (*predictor*) ke dalam analisis kemudian menguranginya satu per satu guna menguji dan memastikan variabel berpengaruh.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguji pengaruh komite audit terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia, maka komite audit diproksikan melalui ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), *tenure* komite audit (TENR) dan diuji pengaruhnya terhadap tingkat *voluntary financial disclosure*.

Tabel 3
Hasil Regresi Linear Berganda

R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
0.383	0.366	22.471	0.000

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 3 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0.383. Nilai *adjusted R square* sebesar 0.366, tersebut menunjukkan variasi *voluntary financial disclosure* yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian

akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), dan *tenure* komite audit (TENR) sebesar 36.6%, sedangkan 63.4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 3 juga menginformasikan nilai F hitung penelitian ini sebesar 22.471 dengan tingkat signifikansi 0.000 ($p\text{-value} < 5\%$), nilai F hitung tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai F table 2.333 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian berarti proksi komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), dan *tenure* komite audit (TENR), secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu *voluntary financial disclosure* (DISC).

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS menjelaskan koefisien regresi masing-masing variable dan tingkat signifikansinya disajikan dalam tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Koefisien Regresi

<i>Variable</i>	<i>Koefisien</i>	<i>t hitung</i>	<i>p-value</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Konstanta</i>	+ 0.428	-	-	
<i>SIZE</i>	+0.019	1.891	0.061	<i>Signifikan</i>
<i>EDU</i>	+ 0.081	1.052	0.295	<i>Tidak Signifikan</i>
<i>TENR</i>	+ 0.002	1.786	0.077	<i>Signifikan</i>

Berdasarkan tabel 4, maka persamaan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DISC} = 0.428 + 0.019 \text{ SIZE} + 0.081 \text{ EDU} + 0.002 \text{ MEET} + \varepsilon$$

Hipotesis 1: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit (SIZE) terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* (DISC). Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.189 dengan $p\text{-value}$ 0.061 signifikan pada tingkat 10%. Ini berarti ukuran komite audit

berpengaruh signifikan terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia, atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Beasley (1996), Felo et.al. (2003; 2009) dan Linda (2011) yang menemukan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary financial disclosure*. Hasil penelitian yang menunjukkan koefisien positif ini berarti bahwa semakin banyak anggota komite audit akan berpengaruh pada makin tingginya tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan.

Dengan demikian hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran komite audit merupakan variable yang relevan untuk mengukur efektifitas komite audit terhadap *voluntary financial disclosure*. Peran komite audit dalam mengawasi proses dan pelaporan keuangan melalui *voluntary financial disclosure* perusahaan terbukti ditentukan oleh ukuran komite audit yang dimilikinya, hasil penelitian ini mendukung pendapat Felo (2003) bahwa komite audit perlu memiliki lebih banyak anggota untuk mengenali potensi misleading pada pelaporan keuangan.

Hipotesis 2: Latar belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian komite audit terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada table4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.052 dengan p -value 0.295 >5%. Ini berarti keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia, atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Bedard (2008), Agrawal-Cadha (2005), Krishnan-Visvanathah (2007), Krishnan-Lee (2009), Mc Daniel (2009), Reeb-Zhao (2009) dan Felo-Solieri (2009) yang menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary disclosure* perusahaan.

Hasil penelitian yang menunjukkan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa dengan penambahan jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi/keuangan searah dengan meningkatkan *voluntary financial disclosure*,

namun demikian penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa variable pendidikan merupakan proksikomite audit yang relevan untuk meningkatkan *voluntary financial disclosure*. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Khomsiyah *et al.* (2005) di Indonesia, dan penelitian Lin *et al.*(2006)di China yang juga menemukan bahwa variable latar belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota komite audit tidak terbukti signifikan.

Hipotesis 3: Jumlah *tenure* komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan

Hipotesis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh *tenure* komite audit terhadap tingkat *voluntary financial disclosure* perusahaan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.786 dengan ρ -value 0.077 <10%. Ini berarti *tenure* anggota komite audit searah dengan dugaan peneliti dan menunjukkan pengaruh yang signifikan, atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Core (1999) dan Bryan *et.al.* (2004). Hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis penelitian dan menunjukkan pengaruh tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Pamudji-Trihartati (2010), serta membuktikan bahwa *tenure* anggota komite audit bukan merupakan faktor penting untuk dimiliki individu anggota komite audit dalam meningkatkan *voluntary financial disclosure* perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *voluntary financial disclosure* di Indonesia, melalui proksi komite audit yang terdiri dari; ukuran, latar belakang keahlian, independensi, komitmen dan pertemuan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang keahlian komite audit (AHLI) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *voluntary financial disclosure*. Ini berarti keahlian berdasarkan latar belakang keahlian bukan merupakan proksi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh komite audit terhadap *voluntary financial disclosure*.
2. Ukuran komite audit (SIZE), dan *tenure* komite audit (TENR), terbukti berpengaruh signifikan terhadap *voluntary financial disclosure* di Indonesia. Hasil penelitian ini berarti bahwa ukuran komite audit dan *tenure* anggota komite audit merupakan proksi yang relevan menjelaskan pengaruh komite audit terhadap *voluntary financial disclosure*.

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai *voluntary financial disclosure* yang masih sangat terbatas di Indonesia serta menjelaskan peran komite audit dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan. Disamping itu penelitian ini juga telah mengidentifikasi proksi dan *measurement* baru yang relevan untuk menjelaskan peran komite audit terhadap *voluntary financial disclosure*.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya OJK sebagai regulator mengatur jumlah dan kualitas anggota serta pertemuan yang diadakan oleh komite audit. Dengan mengatur jumlah pertemuan komite audit diharapkan peran komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dapat terlaksana dengan baik, sehingga transparansi dan keseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dapat dicapai.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Periode penelitian ini hanya selama dua tahun yaitu tahun 2013-2015. Penelitian serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode pengamatan. Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan generalisasinya.
2. Perusahaan di Indonesia diharapkan perlu meningkatkan level pengungkapan informasi keuangan sukarela yang dipublikasikannya. Peningkatan level pengungkapan ini diperlukan dikaitkan transparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sehingga pada akhirnya pemegang saham dan calon investor akan memperoleh informasi yang cukup luas untuk mengambil keputusan investasi dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Lawrence J, Young Park, dan Susan Parker. 2000. The effect of audit committee activity on corporate fraud. *Managerial Finance*.26(11)
- Abbott, Lawrence J., Susan Parker, dan Gary F. Peters. 2004. Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 23 (1): 69-87
- Agrawal, Anup dan Sahiba Chadha. 2005. Corporate governance and accounting scandals. *Journal of Law and Economics*. 48: 371-406
- Arifin, Hasnah Haron, dan Daing Nasir Ibrahim. 2001. Consensus between users and preparers on the importance of the voluntary disclosure items in annual reports: an Indonesian study. *Proceedings The Fourth Asian Academy Management Conference*. Johor Bahru. Malaysia: 458-468.
- BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006. Peraturan No. X.K.6. tentang Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik
- BAPEPAM No. Kep-29/PMI/2004. Pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit.
- Beasley, M. 1996. An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*. 71: 443-465.
- Berge, L. Van den, dan L. De Ridder. 1999. International standardisation of good corporate governance: best practice for the board of directors. Kluwer Academic publisher.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committee. New York. New York stock Exchange and National Association of Securities Dealers.
- Botosan, Christine A. 1997. Disclosure level and the cost of equity capital. *The Accounting Review*. 72(3): 323-349
- Bruslerie, Hubert de La dan Heger Gabteni. 2011. Voluntary financial disclosure, the introduction of IFRS and long-term communication policy: An empirical test on French firms. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 26 juli 2012.

- Chi, Wuchun dan Huichi Huang. 2005. Discretionary accruals, audit-firm tenure and audit-partner tenure: empirical evidence from Taiwan. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. 1 (1): 65-92
- Felo, Andrew dan Steven A. Soleri. 2009. Are all audit committee financial expert created equally. *International Journal of Disclosure and Governance*. 6 (2):150-166
- Felo, Andrew J., Srinivasan Krishnamurthy dan Steven A. Solieri. 2003. Audit committee characteristics and the perceived quality of financial reporting: an empirical analysis. Working Paper. Penn State Great Valley management research showcase workshop
- Healy, P. M., dan Palepu, K. G. 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*. 31 (1-3) (September):405-440.
- Hoitash, Udi, Rani Hoitash dan Jean Bedard. 2009. Corporate governance and internal control over financial reporting: a comparison of regulatory regimes. *The Accounting review*. 84 (3):839-867
- Jensen, Michael C., dan William. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3: 305-360.
- Jia, Chunxin, Shujun Ding, Yuanshun Li, and Zhenyu Wu. 2009. Fraud, enforcement action, and the role of corporate governance: Evidence from China. *Journal of Business Ethics*. 90:561–576.
- Kalbers, L. P., dan T. J. Fogarty. 1993. Audit committee effectiveness: an empirical investigation of the contribution of power. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 12 (Spring): 24-49.
- Krishnan, G. V. dan Visvanathan, G. 2007. Reporting internal control deficiencies in the post-Sarbanes – oxley era: The role of auditors and corporate governance. *The International Journal of Auditing*. 11: 73 – 90.

- Krishnan, Jagan dan Jong Eun Lee. 2009. Audit committee financial expertise, litigation risk & corporate governance. *Auditing: A Journal of Practice And Theory*.28(1):241-261.
- Krishnan, Jayanthi. 2005. Audit committee quality and internal control: an empirical analysis. *The Accounting Review*. 80(2):649-675
- Linda, Lilis Maryasih dan Nuraini. 2011. Komite audit dan kinerja perusahaan: agency theory atau stewardship theory. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Juli. Aceh.
- McDaniel, Linda, Roger D Martin, Laureen A Maines, dan Mark E Peecher. 2002. Evaluating financial reporting quality: The effects of financial expertise vs literacy. *The Accounting Review*. 77: 139
- Meek, Gary K., Robert, Clare B., dan Gray, Sidney. 1995. Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and Continental European multinational corporations. *Journal of International Business Studies*. 26(3): 555
- Mujiono. 2004. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan (studi empiris di Bursa Efek Jakarta). Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. <http://eprints.undip.ac.id/10118/1/2004 MAK3231.pdf>
- Reeb, David M. dan Wanli Zhao. 2009. Director capital and corporate disclosure quality. Working Paper.
- Scott, William R. 2012. Financial Accounting Theory. 6th edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2015. Research Methods for Business: a Skill Building Approach. 6th edition. Wiley and Sons.
- Setiany, Erna. 2016. *Independensi board, pengungkapan sukarela, kualitas laba dan biaya modal ekuitas*. Disertasi. Universitas Sebelas Maret, Solo, Indonesia.
- Setiany, Erna, Sri Hartoko, Djoko Suhardjanto, dan Setianingtyas Honggowati. 2017. Audit committee characteristics and voluntary financial disclosure. Prosiding. *SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 15th - 16th April 2017, Sydney, Australia*.

- Thomas, William C. 2002. When a company looks too good to be true, it usually is, the rise and fall of Enron. *Journal of accountancy*. April:41-48
- Tian, Yu dan Jingliang Chen. 2009. Concept of voluntary information disclosure and a review of relevant studies. *International Journal of Economics and Finance*. 1 (2): 55-59
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Vicknair,D., Hickman,K. dan Carnes, K.C. 1993. A note on audit committee independence: evidence from the NYSE on ‘grey’ area directors. *Accounting Horizons* 7(1): 53 – 57.